

PERANG SIMBOLIK MELAWAN KORUPSI: ANALISIS SEMIOTIK PUISI MENOLAK KORUPSI

Oleh:

Dr. Junaidi

(Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unilak)

email: drjunaidi@yahoo.com

Abstrak

Korupsi menjadi musuh utama bagi bangsa Indonesia saat ini sehingga korupsi harus diperangi. Berbagai cara telah dilakukan untuk melawan kuatnya korupsi, seperti pendekatan hukum dan politik. Namun kenyataannya korupsi semakin banyak terjadi di Indonesia. Pendekatan lain yang dapat mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia adalah pendekatan kultural yang melibatkan partisipasi publik dan penyadaran nilai-nilai kejujuran dalam diri manusia. Para penyair Indonesia telah melakukan gerakan kultural untuk memerangi korupsi dengan cara menulis puisi menolak korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji empat puisi menolak korupsi dengan pendekatan semiotik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat puisi menolak korupsi secara tegas di Indonesia karena korupsi telah menyebabkan bencana, kerusakan, penderitaan dan kemiskinan bagi bangsa Indonesia. Daya rusak korupsi sangat kuat sehingga korupsi harus diperangi dengan berbagai pendekatan. Perang simbolik yang dilakukan oleh para penyair Indonesia dengan cara menulis puisi menolak korupsi memiliki kontribusi dalam membangun semangat anti korupsi dalam diri bangsa Indonesia. Perang simbolik tidak menggunakan kekuatan fisik, hukum dan politik. Tetapi perang simbolik dilakukan dengan cara membangkitkan jiwa bangsa Indonesia untuk menolak korupsi karena sebenarnya dalam jiwa setiap manusia potensi korupsi itu ada.

Kata kunci: *Puisi, Perang simbolik, Pemberantasan korupsi*

Abstract

Corruption is the enemy for the indonesian today. It must be fought. The aim of this study is to examine the four poems that reject the corruption by semiotic approach. The results showed that the four poems explicitly rejects corruption in indonesia. Symbolic war in the poems that write by the Indonesian poets have contributed to build the spirit of anti-corruption in the Indonesian people.

Keyword: *Poems, Symbolic war, corruption rejection.*

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi persoalan sosial yang sangat menganggu pembangunan di Indonesia. Korupsi telah merambah ke seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Korupsi ibarat penyakit kronis yang terus merusak kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari pejabat negara sampai pejabat daerah berlomba-lomba untuk mendapat kekayaan secara salah dan merugikan rakyat. Lebih parahnya lagi, korupsi dianggap perbuatan biasa dan para koruptor tidak merasa bersalah kepada rakyat dan tidak pula merasa berdosa kepada Tuhan. Padahal korupsi adalah kejahatan yang dapat merusak bangsa. Pemberantasan korupsi bukanlah persoalan mudah di Indonesia sebab korupsi telah menjadi budaya yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia (Azra, 2002: 31-36).

Saat ini korupsi tidak lagi menjadi persoalan lokal tetapi korupsi telah menjadi persoalan dunia internasional. Pada tahun 2003 United Nation telah mengeluarkan konvensi pemberantasan korupsi. Dalam bagian pembukaan konvensi itu dinyatakan: *“Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable*

development and the rule of law”. Artinya, negara yang terlibat dalam penandatanganan konvensi ini prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Kutipan di atas menegaskan bahwa korups benar-benar sangat merusak bagi kehidupan berbangsa sehingga korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan karena korupsi sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Status bahaya korupsi dapat dilihat dalam dasar penyusunan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yakni *“bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”* Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyadari bahwa korupsi harus diberantas tetapi ternyata pemberantasan korupsi sulit dilaksanakan di Indonesia. Berbagai kebijakan dan program telah dibuat untuk pemberantasan korupsi. Bahkan

pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas *melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara*. Saat ini KPK menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Bangsa Indonesia memiliki harapan yang besar kepada KPK untuk mengakhiri korupsi di Indonesia.

Terkait pemberantasan korupsi di Indonesia, Human Right Watch (2009: 7) dalam risetnya yang berjudul "*Wild Money: The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia's Forestry Sector*" merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk "*reduce illegal logging and associated corruption by enforcing existing forestry laws and anti-money laundering and anti-corruption laws*". Sebenarnya pendekatan politik dan pendekatan hukum telah dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pendekatan politik pemerintah telah mengeluarkan berbagai

kebijakan dan regulasi terkait pemberantasan korupsi sedangkan pendekatan hukum digunakan untuk membawa kasus korupsi ke wilayah hukum. Meskipun pendekatan politik dan hukum telah dilakukan, ternyata korupsi semakin menjadi-jadi di Indonesia. Pendekatan politik tampak mandul dan pendekatan hukum pun tumpul karena berbagai cara digunakan oleh para koruptor dan kroninya untuk terbebas dari hukuman tindak pidana korupsi. Semakin kuat gerakan untuk memberantas korupsi semakin laju pula praktik korupsi.

Selain pendekatan politik dan hukum, korupsi dapat diberantas dengan pendekatan kultural. Bahkan pendekatan ini dianggap lebih efektif karena melibatkan partisipasi publik. Dalam pendekatan kultural, ditanamkan nilai-nilai kejujuran dan budaya anti korupsi menjadi semangat utama dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, dalam pendekatan kultural masyarakat dibentengi dengan nilai-nilai yang bisa memberantas korupsi dan masyarakat diberdayakan dalam pemberantasan korupsi.

Salah satu gerakan kultural untuk menolak korupsi dilakukan oleh komunitas penyair Indonesia, dengan cara menulis puisi menolak korupsi dan menerbitkannya dalam bentuk antologi *Puisi Menolak Korupsi*. Para penyair di Indonesia memiliki cara khusus untuk melawan derasnya arus

korupsi di Indonesia. Penyair Indonesia telah menabuh genderang perang melawan korupsi di Indonesia dengan cara-cara sastra, yakni dengan menulis puisi yang menolak, mengkritik, dan mencaci-maki perbuatan korupsi dan para koruptor. Untuk menguatkan perang simbolik melawan korupsi, buku antologi tersebut dibuka dengan sebuah pengantar yang disampaikan oleh salah seorang Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. Perang yang dilakukan penyair Indonesia bersifat simbolik. Artinya perang dilakukan dengan menggunakan bahasa agar aksi korupsi yang dilakukan koruptor dapat diberatas. Kata-kata mempunyai kekuatan dalam merubah perilaku dan pikiran seseorang. Kekuatan kata-kata itu digunakan oleh para penyair Indonesia untuk melawan korupsi. Penolakan terhadap korupsi akan berperan dalam hati dan jiwa manusia. Perang simbolik melawan korupsi melalui puisi merupakan ekspresi *voices of conscience* atau suara hati nurani manusia untuk memberantas korupsi. Perang simbolik ini merupakan gerakan kultural yang dilakukan para penyair Indonesia untuk mengalahkan para koruptor agar Indonesia terbebas dari korupsi.

Berdasarkan realitas korupsi yang terjadi di Indonesia dan adanya gerakan penyair Indonesia untuk menolak puisi, tulisan ini secara khusus

diarahkan untuk meneliti gagasan perlawan terhadap korupsi yang terdapat dalam puisi menolak korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan semiotik Roland Barthes, yakni pembacaan tanda lapis pertama (konotasi) dan lapis kedua (denotasi) serta dilanjutkan dengan penemuan mitos dalam setiap puisi yang dibahas. Dengan pembacaan kedua lapis makna dan penemuan mitos, tanda-tanda yang terdapat dalam puisi dapat diperoleh maknanya. Data utama penelitian ini adalah lima puisi yang tulis oleh pengarang yang berbeda. Tahapan dalam penelitian ini adalah membaca, mencatat dan melakukan interpretasi atas tanda-tanda yang terdalam dalam objek penelitian. Selanjunya akan dilakukan penyajian hasil dan penarikan kesimpulan.

Kehidupan manusia penuh dengan simbol. Bahkan Cassirer (1944) menyatakan manusia sebagai *Animal Symbolicum*. Artinya, dalam berinteraksi manusia memerlukan tanda atau simbol. Secara khusus, ilmu sastra sastra memberikan perhatian pada ilmu tanda atau semiotik dalam memahami karya sastra. Untuk melihat pentingnya semiotik dalam sastra ada baiknya melihat posisi karya sastra dalam kehidupan manusia terlebih dahulu. Faruk (2012: 77) secara filosofis mengatakan bahwa "karya sastra adalah objek menuisiawi, fakta kemanusian, atau fakta kultural, sebab

merupakan hasil ciptaan manusia". Faruk menegaskan bahwa karya sastra bersifat khas sehingga berbeda dengan fakta kemanusia lainnya seperti sistem sosial dan sistem ekonomi. Kekhasan sastra terletak pada konstruksi karya sastra itu sendiri. Faruk (2012: 77) menjelaskan bahwa "karya sastra dibangun atas hubungan antar tanda dan makna, antara ekspresi dan pikiran, antara aspek luar dan aspek dalam." Dengan demikian karya sastra dipandanga sebagai fakta simbolik seperti yang disampaikan Mukarovsky (1978).

Tanda utama yang terdapat dalam karya sastra adalah bahasa. Pradopo (2002: 121) menegaskan bahwa bahasa merupakan media karya sastra yang merupakan sistem tanda yang mempunyai makna. Tanda yang digunakan dalam bahasa bermakna bila dilakukan proses pemaknaan. Proses pemaknaan karya sastra dilakukan dengan pembacaan tanda-tanda yang ditentukan oleh sistem tanda yang berlaku dalam karya sastra. Karya sastra biasanya menggunakan bahasa khas, yakni bahasa perlambangan. Kekhasan bahasa dalam karya sastra melahirkan sistem tanda tersendiri dalam karya sastra. Lotmann (1977:15) menegaskan bahwa metafora, konotasi dan bahasa perlambangan bukan bahasa biasa yang dipergunakan sehari-hari tetapi bahasa yang memiliki muatan kebudayaan. Sehingga

pembacaan tanda-tanda karya sastra perlu melihat makna kultural yang terdapat dalam masyarakat yang melahirkan karya sastra dengan menggunakan semiotik.

Salah satu tokoh penting semiotik adalah Roland Barthes. Dalam bukunya *Elements of Semiology* (1964), Roland Barthes menyatakan dua tingkatan bahasa, yakni bahasa sebagai objek dan bahasa sebagai meta bahasa. Bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem tanda yang terdiri dari *signifier* (penanda) dan *signified* (petanda). Sistem tanda pertama disebut dengan denotasi dan sistem kedua disebut dengan konotasi. Terkait sastra, bahasa yang digunakan dalam karya sastra merupakan sistem tanda tingkat pertama, sedangkan konvensi sastranya digolongkan sebagai sistem tanda lapis kedua. Oleh karena itu, untuk menemukan makna karya sastra dapat dilakukan pembacaan secara denotatif dan dilanjutkan dengan pembacaan secara konotatif. Pembacaan tanda lapis pertama bersifat literal dengan merujuk pada kamus sedangkan pembacaan pada lapis kedua berisifat kultural dengan melihat konvensi-konvensi kesastraan yang berkembang dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembacaan secara semiotik terhadap tanda-tanda yang terdapat

dalam lima puisi menolak korupsi diawali dengan penjelasan makna denotasi untuk menemukan makna literal dari bagian-bagian puisi. Setelah diperoleh makna literal dilanjutkan dengan penemuan makna konotasi untuk mengungkap *latent meaning* atau makna tersembunyi yang terdapat dalam puisi tersebut. Untuk melengkapi hasil penelitian, diungkapkan lagi mitos atau ideologi yang tersembunyi dalam setiap puisi.

1. Puisi “Kutbah Air Mata” karya Abdurrahman El Husaini

Berdasarkan pembacaan semiotik tingkat pertama dan tingkat kedua terhadap puisi “Kutbah Air Mata”, berikut diringkaskan hasilnya dalam tabel 1:

Tabel 1: Pembacaan semiotik puisi “Kutbah Air Mata”

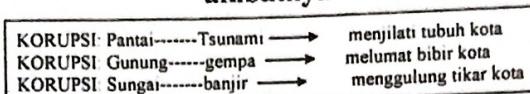
Unit Analisis	Denotasi	Konotasi
kutbah air mata	Pidato air mata	Penyampai pesan kesedihan mendalam akibat kehancuran yang ditimbulkan oleh korupsi di Indonesia.
jika kesempatan itu masih ada/ akan terus kusampaikan kutbah itu/ di pantai-pantai/ lidah tsunami akan selalu menjilati tubuh kota/ bila dosa-dosa koruptor/ semakin mendarah daging	Aku lirik mengatakan bahwa apabila masih ada kesempatan atau waktu, ia akan menyampaikan khutbah di pantai dan ia mengatakan bahwa bencana tsunami akan melanda kota bila para koruptor terus berbuat dosa dengan melakukan korupsi	Korupsi yang semakin kuat terjadi Indonesia telah mendatangkan kehancuran dan penderitaan bagi bangsa Indonesia.
jika masih ada waktu/ akan terus ku terakan kutbah itu/ di gunung-gunung/ mulut gempa akan selalu melumat bibir kotamu/ bila praktik korupsi/ semakin mengurita	Aku lirik kembali menyatakan bahwa ia akan menyampaikan kutbah di gunung-gunung untuk mengingatkan bahwa gempa akan terjadi bila praktik korupsi terus terjadi.	Bencana akan terus datang dan akan merusak kehidupan di Indonesia bila praktik korupsi terus terjadi.
jika masih tersisa suraku/ akan terus ku bacakan isi kutbah itu/ di sungai-sungai /tangan banjir akan menggulung tikar kotamu/ bila rumput liar KKN semakin tumbuh subur	Aku lirik mengingatkan lagi bahwa jika ia masih punya waktu, maka ia akan teruskan membaca kutbah di sungai untuk mengingatkan bahwa banjir akan melanda kota bila praktik KKN terus dijalankan.	Bencana akan terus datang dan akan merusak kehidupan bila praktik KKN terus dilakukan.

mengapa masih ada korupsi// sedang tsunami sudah berkali-kali terjadi	Aku lirik menanyakan mengapa masih terjadi korupsi padahal tsunami telah beberapa kali terjadi	Bangsa Indonesia diingatkan untuk berhenti korupsi karena korupsi telah menyebabkan bencana, kehancuran dan penderitaan bagi rakyat Indonesia.
Mengapa masih ada korupsi// sedang gempa bumi berkali-kali terjadi	Aku lirik menanyakan mengapa masih terjadi korupsi padahal gempa telah beberapa kali terjadi	Bangsa Indonesia diingatkan untuk berhenti korupsi karena korupsi adalah menyebabkan bencana, kehancuran dan penderitaan bagi rakyat Indonesia.
Mengapa masih ada korupsi// sedang banjir besar sudah berkali-kali terjadi	Aku lirik menanyakan mengapa masih terjadi korupsi padahal banjir telah beberapa kali terjadi	Bangsa Indonesia diingatkan untuk berhenti korupsi karena korupsi telah menyebabkan bencana, kehancuran dan penderitaan bagi rakyat Indonesia.
Mengapa masih ada korupsi// sedang presiden sudah enam kali berganti	Aku lirik menanyakan mengapa masih terjadi korupsi di Indonesia padahal presiden telah beberapa kali terjadi	Semua presiden yang pernah berkuasa di Indonesia gagal dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Dalam puisi ini korupsi dipandang sebagai perbuatan dosa karena korupsi tidak hanya merugikan negara tetapi juga merugikan banyak orang. Uang pembangunan yang bersumber dari rakyat seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Namun, karena ulah para koruptor uang rakyat tidak sampaikan ke tangan rakyat. Itulah dosa terbesar koruptor kepada rakyat. Karena besarnya dosa koruptor, alam pun murka kepada bangsa Indoensia.

Secara literal kutbah [khotbah] bermakna pidato yang berisikan pesan dan nasihat agar orang berbuat kebenaran dan air mata bermakna air yang keluar dari mata manusia akibat menangis. Secara konotatif, judul puisi ini menandakan kesedihan sangat mendalam akibat korupsi yang melanda Indonesia. Kesedihan mendalam itu ditandai oleh hadirnya tiga bencana alam yang melanda Indonesia akibat korupsi, yakni tsunami, gempa dan banjir. Berikut konstruksi korupsi dan akibatnya dalam puisi ini.

Gambar 1 : Konstruksi korupsi dan akibatnya



Pada bagian awal puisi ditunjukkan adanya hubungan korupsi dengan bencana tsunami yang pernah melanda Indonesia. Kaitan antara “tsunami yang menjilat kota” dengan “dosa koruptor” menandakan betapa dahsyatnya daya rusak korupsi bagi kehidupan manusia. Frasa “menjilati tubuh kota” menegaskan bahwa korupsi telah menjadi bencana yang dapat merusak kehidupan manusia. Puisi ini juga menegaskan bahwa korupsi harus ditolak karena perbuatan buruk ini dapat menyebabkan alam marah, yakni dengan datangnya tsunami. Seperti diketahui, tsunami adalah bencana alam yang sangat dahsyat pernah melanda beberapa daerah di Indonesia. Signifikansi alam pun marah akibat ulah para koruptor menegaskan sangat buruknya tindakan korupsi.

Kemarahan alam kemudian ditandai dengan ungkapan “*mulut gempa akan selalu melumat bibir kotamu/bila praktik korupsi/ semakin menggurita*”. Ini menegaskan bahwa perbuatan korupsi menyebabkan gempa bumi. Korupsi telah mengguncang Indonesia sehingga Indonesia berada dalam proses kehancuran. Frasa “semakin menggurita” menandakan bahwa

praktik korupsi semakin kuat dan telah merambah ke berbagai aspek kehidupan di Indonesia.

Pada bagian selanjutnya digambarkan pula datangnya banjir dari sungai yang menghancurkan kota-kota akibat semakin berkembangnya korupsi. Dalam bagian ini, digambarkan bahwa tidak hanya korupsi yang menyebabkan bencana tetapi ada juga *kolusi* dan *nepotisme* yang semakin memperparah kondisi bangsa Indonesia. Kedatangan banjir menandakan bahwa korupsi menjadi bencana besar yang dapat merusak Indonesia. Penggunaan frasa “rumput liar” yang merujuk kepada KKN menandakan bahwa praktik *kolusi*, *korupsi* dan *nepotisme* adalah perbuatan ilegal yang merusak kehidupan bangsa Indonesia.

Pada bagian akhir puisi ini ditandai dengan pertanyaan tentang mengapa korupsi terus saja terjadi padahal alam telah menunjukkan kemurkaannya. Meskipun tsunami, gempa dan banjir telah terjadi berulang-ulang kali di Indonesia, bangsa Indonesia belum juga mampu menghentikan korupsi. Tampaknya bangsa Indonesia tak peduli lagi dengan tanda-tanda kemurkaan alam akibat dosa korupsi. Meskipun korupsi terus menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia, praktik korupsi terus terjadi sebab korupsi telah melekat dalam diri manusia.

Pada bagian penutup puisi, tidak ada lagi alam yang ditampilkan terkait penyebab korupsi. Tetapi yang ditampilkan adalah enam presiden yang pernah memimpin Indonesia. Kegagalan enam presiden dalam mengehentikan korupsi menandakan kegagalan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun sudah ada KPK, praktik korupsi terus saja terjadi di Indonesia. Puisi ini mengisyaratkan bahwa alam tidak bisa menghentikan korupsi tetapi alam akan semakin murka bila praktik korupsi terus terjadi di Indonesia. Yang bisa menghentikan korupsi itu adalah bangsa Indonesia sendiri yang didukung oleh komitmen yang kuat oleh pemerintah.

Mitos yang dibangun dalam puisi ini adalah kuatnya daya rusak korupsi sehingga korupsi menjadi bencana besar yang dapat merusak berbagai kehidupan di Indonesia. Meskipun korupsi telah merusak Indonesia, korupsi belum bisa dihentikan di Indonesia. Bahkan praktik korupsi terus menguat di Indonesia. Pemerintah Indonesia dianggap gagal menghentikan korupsi karena ternyata praktik korupsi terus meluas dan telah menjadi tradisi.

1. Puisi “Tolong Berhentilah” karya Agus Sri Danardana

Hasil pembacaan semiotik tingkat pertama dan tingkat kedua

terhadap puisi “Tolong Berhentilah”, diringkaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2: Pembacaan semiotik puisi “Tolong Berhentilah”		
Unit Analisis	Denotasi	Konotasi
tolong berhentilah	Pernyataan berhenti	Himbaun untuk tidak melakukan kemunafikan dalam pemberantasan korupsi
tolong berhentilah bicara tentang keteteran angka-angka yang membilang di semua kepala/sebab hanya semak/gayus, nazar, angic dan banyak nama/ mencalon angka-angka.	Aku lirik meminta orang-orang berhenti berbicara tentang angka-angka karena keserakahan gayus, nazar, angic dan banyak nama lainnya telah mencuri angka-angka.	Kemunafikan telah terjadi dalam penyusunan anggaman pembanguna sebab para korupor seperti gayus, nazar, angic dan lainnya telah mencuri uang rakyat dengan memanfaatkan jabatan mereka.
tolong berhentilah bicara konservasi alam yang mengakal di semua hamparan/ sebab hanya amaral/ penambangan, pembalakan, dan perburuan membuat liar di mana-mana.	Aku lirik meminta orang-orang untuk berhenti berbicara tentang konservasi alam karena aktivitas pemisakan alam terus saja terjadi seperti penambangan, pembalakan dan perburuan.	Kemunafikan telah terjadi dalam program konservasi alam sebab orang berbicara penyelamatan alam tetapi pengrusakan alam terus saja terjadi
tolong berhentilah, bicara tentang reformasi birokrasi yang terlalu rapi di semua lembaga dan instansi/ sebab hanya tipu tepek/ kertas-kertas sembunyi/ laci bandar kongsi/ kursi menjakan iblis dan peri/ gaji tinggi dan tikus berdas/ sejalan serasi.	Aku lirik meminta orang-orang berhenti bicara reformasi birokrasi yang dilakukan berbagai instansi sebab program tersebut hanya sebuah tipuan belaka untuk menutupi praktik-praktik kecurangan dan korupsi yang dilakukan oleh para petinggi Indonesia.	Kemunafikan telah dalam program reformasi sebab orang-orang yang berbicara reformasi birokrasi ternyata tetus melakukan korupsi. Padahal reformasi birokrasi bertujuan untuk memberantas korupsi.
tolong berhentilah bicara segala unusan, apalagi memberantas korupsi/ sebab hanya pecuma/ orkestra keserakahan kalian/ senyapkan dendang kemiskinan kamu.	Aku lirik meminta orang-orang berbicara segala hal, khususnya tentang pemberantasan korupsi sebab itu tidak berguna karena keserakahan para korupor mengalahkan program kesejahteraan untuk rakyat.	Kemunafikan semakin menjadi. termasuk kemunafikan dalam pemberantasan korupsi sebab nafsu keserakahan korupor jauh lebih kuat dari pada nasi untuk membeli kepentingan rakyat.

Puisi ini diarahkan untuk melawan praktik kemunafikan yang terjadi di Indonesia. Gagasan, wacana, gerakan, penegakkan hukum dan kebijakan pemberantasan korupsi sering digaung-gaungkan di Indonesia. Namun semua itu terkesan basa-basi saja sebab praktik korupsi terus meningkat dan semakin parah di Indonesia. Ironisnya, orang-orang yang menyuarakan pemberantasan korupsi banyak terlibat kasus korupsi. Bahkan para hakim yang mengadili kasus korupsi juga terlihat dalam praktik korupsi. Begitulah parahnya kasus

korupsi di Indonesia. Kemarahan terhadap basa-basi pemberantasan korupsi menjadi gagasan utama dalam puisi ini. Berikut ilustrasi kontruksi kemarahan terhadap basa-basi pemberantasan korupsi dalam puisi ini:

BERHENTI BICARA	Keteraturan Angka-angka
	Konservasi Alam
	Reformasi Birokrasi
	Pemberantasan Korupsi

Puisi ini dibuka dengan ungkapan kemarahan atas kemunafikan menjalankan tugas negara. Tiga nama ikon koruptor Indonesia digunakan dalam puisi ini, yakni Gayus [Gayus Tambunan] terkenal dengan kasus manipulasi pajak, nazar [Nazarudin] adalah politikus partai Demokrat yang terkenal dengan kasus korupsi Hambalang dan Angie [Angelina Sondakh] terkenal sebagai politisi perempuan dari Partai Demokrat dalam kasus korupsi di beberapa kementerian. Puisi ini menegaskan bahwa para koruptor telah berbuat serakah karena telah mencuri uang rakyat padahal mereka adalah wakil rakyat dan abdi negara yang berperan dalam penyusunan anggaran pembangunan bagi rakyat. Mereka berbicara tentang program kesejahteraan rakyat, padahal mereka telah mengambil urang rakyat.

Selanjutnya ditampilkan persoalan kemunafikan yang terjadi terkait kegiatan konservasi alam. Para koruptor menyuarakan penyelamatan alam padahal dibalik misi mereka itu,

terdapat misi pribadi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Akibatnya, program konservasi alam tidak berjalan tetapi justru praktik korupsi yang semakin parah. Program konservasi alam sering dijadikan lahan empuk bagi para koruptor sebab program konservasi alam ini mudah dimanipulasi dan melibatkan para cukong-cukong bermodal besar.

Persoalan korupsi selanjutnya dibidik dalam puisi ini adalah reformasi birokrasi. Salah satu penyebab korupsi adalah buruknya praktik birokrasi di Indonesia. Karena buruknya birokrasi ini, bahkan dibuat satu kementerian yang secara khusus menangani reformasi birokrasi. Ironisnya, gerakan reformasi birokrasi dijadikan selubung untuk memperlanjar korupsi oleh para birokrat dan pejabat tinggi. Program reformasi birokrasi hanya sebuah sandiwara untuk memperlanjar korupsi. Dalam puisi ini digunakan beberapa frasa terkait korupsi, yakni *kursi manjakan iblis dan peri*. Frasa ini menandakan bahwa sistem birokrasi semakin memanjakan para koruptor yang dijuluki sebagai “iblis” dan “peri.” Sebutan “iblis” menandakan sangat hinanya pelaku korupsi karena mereka mencuri uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan sebutan “peri” menandakan bahwa para koruptor ini dapat menampilkan kemunafikannya dengan cara berpura-pura baik dan ingin menyelamatkan

uang rakyat dengan cara melakukan pencitraan terkait pemberantasan korupsi. Padahal kenyataannya mereka tetap menjalankan aksi korupsi. Dalam bagian ini, koruptor juga disebut sebagai “tikus berdasi.” Tikus berdasi sering diasosiasikan sebagai para pejabat negara yang melakukan korupsi. Sebutan ini menandakan bahwa para koruptor yang beridentitas pejabat negara telah mencuri uang rakyat.

Pada bagian akhir puisi ini ditutup dengan ekspresi kemarahan atas pemberantasan korupsi. Bagian ini menjadi mitos tentang pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi hanya dianggap basa-basi dan penuh dengan praktik kemunafikan. Puisi ini menunjukkan adanya sikap “muak” akibat semakin kuatnya praktik korupsi di Indonesia. Ungkapan “orquestra keserakahan kalian/ senyapkan dendang kemiskinan kami” menandakan bahwa praktik korupsi benar-benar ditata secara rapi agar lebih mudah dilakukan. Bahkan gerakan pemberantasan korupsi hanya sebuah cara untuk menutupi korupsi. Semakin kuat kita bicara pemberantasan korupsi maka semakin kuat pula praktik korupsi dijalankan sebab akar dan roh keserakahan itu ada dalam diri manusia.

3. Puisi “Syair Para Pengutang Berebut Utang di Negeri Utang” karya Fakhrunas MA Jabbar

Hasil pembacaan semiotik tingkat pertama dan tingkat kedua terhadap puisi “Syair Para Pengutang Berebut Utang di Negeri Utang”, disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 3:
Pembacaan semiotik puisi “Syair Para Pengutang Berebut Utang di Negeri Utang”

Unit Analisis	Denotasi	Konotasi
syair para pengutang berebut utang di negeri utang	Kisah para pembuat utang berebut utang di negeri yang banyak utang.	Orang Indonesia berlomba-lomba membuat utang dan Indonesia dikenal sebagai negara banyak utang.
inilah kisah para pengutang/ berebut utang di negeri berutang/ tagihan datang jejak pun hilang/ utang berutang jadi berbilang	Diceritakan para pembuat utang di negara yang banyak utang dan ketika tagihan utang datang mereka mlarikan diri dan utang pun semakin bertambah.	Indonesia dikenal sebagai negara banyak utang dan orang Indonesia sudah terbiasa membuat utang tetapi sering tidak mampu membayar utang sehingga utang pun terus bertambah.
Para bayi disuguh susu sapi bantuan utang/ anak-anak pun dibesarkan dalam rumah utang/ mereka disupai nasi dan lauk-pauk utang/ sampai usia belia terbiasa pula utang mengutang/ sampai beli kutang pun ... berutang	Diceritakan bahwa bayi-bayi yang hidup di Indonesia mengkonsumsi susu sapi dari bantuan utang, rumah tempat anak-anak tumbuh juga dari utang, makanan sehari-hari mereka juga dari utang, sehingga sampai remaja mereka terbiasa berutang dan bahkan sampai beli kutang pun mereka berutang.	Berbagai aspek kehidupan manusia bergantung dari hutang mulai dari kebutuhan dasar, kebutuhan perumahan, kebutuhan pokok atau pangan dan sandang atau pakaian. Bahkan utang telah menjadi kebiasaan hidup.
utang jadi panglima dipuja/ di bangku-bangku sekolah tinggi para mahasiswa/ dijalil sistem utang semesteran/	Kebiasaan berutang digemari dan para mahasiswa dipaksa mengikuti sistem utang semesteran/	Berutang telah menjadi suatu sistem baku yang dijalankan
orang-orang berpas sag mengulur kartu utang kala belanja/ mencikmati perjalanan dan pelesiran sambil berutang-utang pula/	Orang-orang kaya menggunakan kartu kredit ketika berbelanja dan berjalan-jalan.	Bagi golongan tertentu penggunaan kartu kredit dianggap sebagai gaya untuk menunjukkan status sosial
ibu-ibu kampung dan perkotaan menggelar arisan utang-berutang/ tak sudah-sudah begitulah ihwal berutang dilestarkan	Para ibu-ibu baik di kota maupun di kampung juga mengikuti arisan dengan sistem utang dan sistem utang ini terus	Sistem utang telah terbiasa dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

Gambar 3: Konstruksi utang penyebab korupsi

negeri ini pun tumbuh dari utang/ utang dari utang berbunga-bunga berkepanjangan sampai tak kira menyunung beban/ utang pun tumbuh di atas angka pertumbuhan	Indonesia berkembang dengan utang yang terus bertambah karena adanya bunga dan bahkan utang di Indonesia sampai melebihi angka kewajaran.	Pada tingkat negara, Indonesia telah terjerap dalam sistem utang sehingga utang terus membebani Indonesia
para petani menebar benih di ladang/ cengkeh ditanam yang tumbuh utang/koperasi utang- piutang pun begitu berkembang	Para petani bertanam juga dengan bermodalkan utang dan utang mereka terus bertambah. Sistem utang terus berkembang dengan adanya koperasi yang menawarkan utang	Pada tingkat bawah, rakyat pun telah terjerap dengan sistem utang sehingga hidup mereka bergantung pada utang.
inilah syair para pengutang/ takkan berakhir sepanjang zaman.	Inilah cerita para pembuat utang dan cerita utang akan terus terjadi	Perangkap sistem utang tidak akan pernah berakhir

Bayi	— utang — susu
Anak-anak	— utang — rumah, makanan
Belia	— utang — pakaian, budaya utang
Mahasiswa	— utang — sistem semester
Orang kaya	— utang — kartu kredit, belanja, jalan-jalan
Ibu-ibu	— utang — arisan
Negara	— utang — pembangunan
Petani	— utang — benih
Koperasi	— utang — sistem utang

Dalam puisi ini persoalan korupsi dilihat dari perspektif utang yang melanda Indonesia. Dalam puisi ini tidak ditemukan kata korupsi. Tetapi karena puisi ini telah dinyatakan sebagai puisi melawan korupsi, puisi ini akan ditafsirkan dari sudut pandang korupsi. Sebenarnya, dalam persoalan utang yang berlebihan di Indonesia sudah terdapat makna tindakan koruptif. Orang yang berhutang telah melakukan korupsi sebab ia tidak bertanggung jawab dalam membayar utangnya.

Di Indonesia kita dipaksa membayar utang, padahal kita tidak pernah membuat utang. Ini utang yang diwariskan. Bahkan ketika anak-anak Indonesia lahir, negara kita sudah mewariskan utang kepada mereka. Sungguh memalukan! Berikut disampaikan konstruksi utang dalam puisi ini:

Utang telah menjadi tradisi di Indonesia. Mulai dari negara sampai rakyat kecil telah biasa berutang. Bergayakan syair, puisi ini dibuka dengan pernyataan sebuah kisah pembuat utang di Indonesia. Sistem utang yang berkembang di Indonesia melibatkan berbagai golongan mulai dari negara sampai rakyat dan mulai dari bayi sampai dewasa, yakni bayi, anak-anak, belia, mahasiswa, orang kaya, ibu-ibu, negara, petani dan koperasi. Sistem utang pun telah meliputi berbagai aspek kehidupan manusia seperti pembelian susu buat bayi, perumahan, pakaian, pendidikan, belanja, jalan-jalan, arisan, pembangunan, pertanian dan koperasi.

Puisi ini mengisahkan perjalanan kehidupan orang Indonesia mulai dari lahir sampai dewasa telah terjerat oleh utang. Kisa ini menandakan bahwa utang telah membelenggu kehidupan bangsa Indonesia dan bahkan mulai bayi telah bergantung dengan utang. Ini juga menegaskan bahwa utang itu seperti telah diwariskan dari generasi

terdahulu kepada generasi berikutnya. Dalam puisi ini utang digambarkan telah menjadi tren dan gaya hidup baik bagi orang kota yang kaya maupun orang-orang kampung. Orang kota digambarkan menggunakan kartu utang atau *credit card* untuk untuk menikmati kehidupan. Ini menegaskan bahwa utang selalu mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Bila dalam bagian sebelumnya disampaikan kisah utang pada tingkat masyarakat, selanjutnya disampaikan pula persoalan utang pada tingkat negara. Saat ini Indonesia memang dikenal sebagai negara yang memiliki banyak utang. Meskipun telah berganti pemerintahan, utang Indonesia terus saja bertambah. Bahkan ada kecenderungan satu masa pemerintahan akan mewariskan utang kepada pemerintahan selanjutnya. Bahkan beban utang Indonesia dinyatakan telah melampaui ambang batas. Ini tentu saja menjadi beban yang sangat berat bagi bangsa Indonesia.

Sistem utang yang dikembangkan pada tingkat negara Indonesia juga menular kepada tingkat masyarakat sehingga profesi masyarakat pun terperangkap oleh sistem utang. Dalam puisi ini digambarkan bahwa para petani yang bercocok tanam ternyata juga merugi karena menghasilkan utang. Dalam sistem perekonomian masyarakat juga dipengaruhi oleh utang dengan adanya

koperasi yang menerapkan sistem utang, yang pada akhirnya juga memberatkan masyarakat.

Mitos utang yang dibangun dalam puisi ini adalah sangat kuatnya penerapan sistem utang di Indonesia sehingga sistem ini akan terus berkembang dalam masyarakat Indonesia mulai tingkat negara sampai ke tingkat masyarakat. Utang telah membelenggu semua aspek kehidupan manusia. Pemerintah dan rakyat Indonesia tampak telah berperilaku koruptif karena telah membuat utang melebihi dari kemampuan untuk membayar utang. Puisi ini mencoba mendekati persoalan korupsi dari sisi dalam manusia, yakni kebiasaan orang Indonesia yang gemar berutang. Bahkan kegemaran berutang bisa menjadi pemicu perbuatan korupsi dengan cara melakukan korupsi untuk membayar utang.

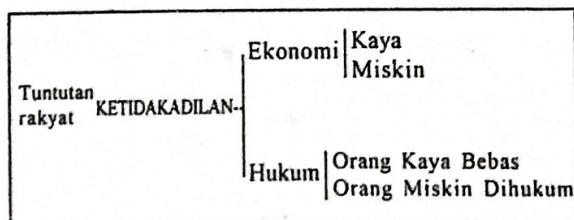
4. Puisi “Negeri Kami” karya Husnu Abadi

Unit Analisis	Denotasi	Konotasi
negeri kami	Negeri kami	Indonesia
tuntutan negeri ini/ adalah tuntutan orang-orang pinggiran/ adalah tuntutan orang-orang papa berkepanjangan/ adalah tuntutan kaum pemulung yang selalu berkelana/ masihkah negeri yang kaya ini/ tersedia juga buat kami.	Ada tuntutan kepada pemerintah Indonesia oleh orang pinggiran, miskin, dan pemulung terhadap kekayaan Indonesia yang tidak berpihak kepada mereka.	Ketidakadilan sosial dirasakan oleh rakyat kecil di Indonesia karena mereka tidak bisa merasakan kekayaan Indonesia.
ada sebuah pisau/ pisau yang datang dari sebuah negeri/ wajahnya selalu bermuka dua/ sekali-sekali melihat ke atas/ lebih banyak melihat ke bawah/ kepada kaum kerah putih wajahnya ramal/ tak susah-susah/ kepada kaum kakilima taringnya runcing/ tak kering-kering/ ada sebuah pisau/ wajahnya selalu bermuka dua/ ke bawah wajahnya tegas dan kaku/ ke atas wajahnya ceria tak kenal waktu	Ada sebuah pisau di Indonesia yang memiliki mata dua. Pisau tersebut kadang-kadang menghadap ke atas dan sering menghadap ke bawah. Pisau tersebut ramah kepada orang kaya tetapi kepada orang kecil pisau tersebut bersifat tajam. Pisau tersebut selalu tampil bermuka dua. bila ke bawah bersifat tegas tetapi bila melihat ke atas wajahnya gembira.	Penegakan hukum di Indonesia tidak adil. Hukum lebih ditegakkan bagi rakyat kecil sedangkan orang-orang kaya cenderung bebas dari tuntutan hukum sebab orang kaya dengan uangnya mampu menyogok para penegak hukum.

dari suka miskin aku mendengar cerita tentang Bung Karno/ yang dikurung Belanda karena melawan penjajahan/ memperjuangkan negeri merdeka buat kaum miskin	Di penjara Sukamiskin Aku lirik mendengarkan cerita Bung Karno yang pernah ditahan Belanda karena berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.	Bung Karno berjuang untuk kemerdekaan Indonesia meskipun ia harus melawan tirani penjajahan Belanda.
hari ini kembali aku dan Sukamiskin/ banyak putra mahkota yang tinggal di sanu/ yang dikurung pengusa negeri ini/ karena memeras hak-hak orang miskin/ lewat anggaran negeri/ tak henti-henti/ kembali dan Sukamiskin/ mereka tidak mungkin menjadi miskin.	Aku lirik kemudian bercerita tentang kedatangannya ke penjara Sukamiskin dan ia melihat banyak pemimpin Indonesia yang tinggal di penjara tersebut karena mereka divonis mengambil hak orang miskin yang terdapat dalam anggaran negara dan mereka tetap kaya meskipun keluar dari penjara Sukamiskin.	Para koruptor yang telah mencuri uang rakyat dipenjarakan di Sukamiskin dan ini merupakan konsekuensi dari tindak pidana korupsi yang mereka lakukan. Mereka tetap menjadi kaya karena uang korupsinya meskipun mereka telah diperjara.
setiap tadanu ramadhan di surau ini/ selalu ada lomba menghafal surat-surat pendek/ pemenangnya selalu yang membaca surat Al Mauu/ surat yang bercerita tentang malangnya orang-orang yang shalat/ yang lupa akan nasib orang-orang miskin/ baik yang tinggal di kaki lima atau yang diusir dan kaki-kaki sang penguasa	Aku lirik menceritakan bahwa pada saat membaca Al Quran pada malam Ramdhan selalu dilakukan perlombaan membaca surat pendek dan pemenangnya adalah surat Al Mauu yang mengisahkan malangnya nasib orang-orang yang melakukan shalat tetapi ia lupa akan nasib orang miskin. yakni orang yang tinggal di kaki lima atau orang yang dikalahkan oleh para pengusa.	Kita harus berbuat kebaikan untuk membela orang-orang miskin yang diakibatkan oleh korupsi para pengusa.

Puisi ini menandakan pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat kecil terhadap ketidakadilan yang dirasakan di Indonesia. Ketidakadilan itu dalam aspek ekonomi dan hukum. Dalam bentuk ekonomi rakyat tidak merasakan kekayaan Indonesia sedangkan dari aspek hukum rakyat kecil selalu menjadi korban, sebaliknya orang-orang kaya selalu bebas dari tuntutan hukum karena mereka mampu untuk membayar penegak hukum.

Gambar 4 : Konstruksi tuntutan rakyat atas ketidakadilan



Dalam puisi ini ketidakadilan dalam hukum ditandai dengan penggunaan kata pisau. Frasa pisau bermata dua menandakan wajah penegakan hukum di Indonesia. Gambaran pisau tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas menandakan bahwa penegakkan hukum dibebankan kepada rakyat kecil sedangkan para pejabat tinggi dan orang-orang kaya dapat terbebas dari tuntutan hukum. Ungkapan *kepada kaum kerah putih wajahnya ramah/ tak susah-susah/ kepada kaum kaki lima taringnya runcing* semakin menegaskan bahwa penegakkan hukum tidak berpihak kepada rakyat kecil. Rakyat kecil justru dijadikan korban atau tumbal untuk menunjukkan bahwa seolah-olah telah terjadi penegakan hukum. Hal ini disebabkan orang yang memiliki uang dapat menyogok para penegak hukum. Para koruptor kelas kakap pun banyak terbebas dari hukuman karena kuasa mereka mengatur keputusan pengadilan.

Puisi ini menampilkan dua ilustrasi yang kontras di penjara Sukamiskin, yang terletak di Jawa Barat. Gambaran pertama adalah Sukarno yang ditahan karena perjuangannya membeli kemerdekaan Indonesia. Sedangkan gambaran kedua adalah para koruptor yang divonis karena telah mencuri uang rakyat. Perbandingan ini menandakan konsekuensi buruk yang diterima para koruptor yang telah mencuri uang

rakyat. Sukarno dipenjara karena membela orang miskin sedangkan koruptor dipenjara karena mencuri uang orang miskin. Namun kondisi para koruptor di Sukamiskin baik-baik saja karena kekayaan yang mereka peroleh dari hasil korupsi korupsi cukup membuat mereka selalu kaya. Proses hukuman yang mereka lalui di penjara Sukamiskin tidak membuat mereka miskin.

Perhatian kepada orang miskin merupakan mitos yang dibangun dalam puisi ini. Puisi ini sengaja ditutup dengan sebuah renungan tentang pentingnya memperhatikan orang miskin dengan mengutip pesan keutamaan memperhatikan orang miskin dari surat Al Maun. Penggunaan surat Al Maun bertujuan untuk mengingatkan orang untuk memperhatikan rakyat kecil atau orang miskin sebab mereka orang yang lemah akibat ketidakmampuan negara mengurus mereka. Bahkan orang-orang miskin ini menjadi korban dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Orang miskin yang perlu diperhatian dalam puisi ini adalah orang miskin yang sebenarnya dan bukan para koruptor yang ditahan di penjara Sukamiskin. Para koruptor yang ditahan di penjara Sukamiskin seharusnya menjalani proses pemiskinan sebab mereka telah membuat rakyat menjadi tambah miskin.

PENUTUP

Berdasarkan pembacaan terhadap lima puisi yang terhimpun dalam “Puisi Menolak Korupsi” dapat disimpulkan bahwa kelima puisi menunjukkan perlawanan terhadap praktik korupsi yang semakin kuat di Indonesia. Korupsi harus diperangi sebab korupsi telah menyebabkan bencana, kerusakan, penderitaan dan kemiskinan bagi bangsa Indonesia. Daya rusak korupsi sangat kuat sehingga korupsi harus diperangi dengan berbagai pendekatan. Perang simbolik yang dilakukan oleh para penyair Indonesia dengan cara menulis puisi menolak korupsi memiliki kontribusi dalam membangun semangat anti korupsi dalam diri bangsa Indonesia. Perang simbolik tidak menggunakan kekuatan fisik, hukum dan politik. Tetapi perang simbolik membangkitkan jiwa bangsa Indonesia untuk menolak korupsi karena dalam jiwa itulah sebenarnya potensi korupsi itu ada. Perang simbolik melawan korupsi tidak seperti gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK karena para penyair tidak punya kekuasaan seperti KPK. Tetapi perang simbolik melawan korupsi dapat membangun “KPK” dalam diri manusia. Bila “KPK” telah hadir dalam hati maka orang Indonesia akan berhenti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. 2002. *Korupsi dalam Perspektif Good Governance*. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. 1 Januari 2002 : 31 – 36.
- Barthes, R. 1964. *Elements of Semiology*. London: Jonathan Cape.
- Cassirer, E. (1921-1929/1955). *The Philosophy of Symbolic Forms*. Vol. 1.: Language. Vol.2: Mythical Thought. Vol. 3: The Philosophy of Knowledge. New Haven: Yale University Press.
- Faruk. 2012. *Metode Penelitian Sastra Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Human Right Watch. 2009. *Wild Money: The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia's Forestry Sector*. New York.
- Leak, S dan kawan-kawan (editor). 2013. *Puisi Menolak Korupsi*. Surakarta: Forum Sastra
- Surakarta.
- Leak, S dan kawan-kawan (editor). 2013. *Puisi Menolak Korupsi 2a*. Surakarta: Forum Sastra
- Surakarta.
- Lotman, J. 1977. *The Structure of the Artistic Text*. Michigan: University of Michigan.
- Mukarovsky, Jan. 1978. *Structure, Sign, and Function*. New Harven and London: Yale University Press.
- Pradopo, R D. *Pengkajian Puisi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan
- United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.